

## Penerapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Izin Dan Retribusi Pemotongan Pepohonan Di Kabupaten Lumajang

**Fitri Anggraeni**

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email: [fa300546@gmail.com](mailto:fa300546@gmail.com)

**Dewita Sari**

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email: [dewitasari1409@gmail.com](mailto:dewitasari1409@gmail.com)

**Mariya Ulfa**

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email: [mariaulfamjkr@gmail.com](mailto:mariaulfamjkr@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to analyze and evaluate the application of Standard Operating Procedures (SOP) in the implementation of permits and levies for cutting trees in Lumajang Regency. The research method used is a case study with a qualitative approach. Data was collected through in-depth interviews with relevant stakeholders as well as analysis of documents related to applicable regulations and SOPs. The research results show that the application of SOPs in implementing permits and levies for cutting trees still has several shortcomings and challenges. This research also provides recommendations for further improvement and development in implementing the SOP.*

**Keywords:** *Standard Operating Procedures, Permits, Retributions, Tree Cutting, Lumajang Regency*

**Abstrak.** Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan izin dan retribusi pemotongan pepohonan di Kabupaten Lumajang. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait serta analisis dokumen terkait peraturan dan SOP yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SOP dalam pelaksanaan izin dan retribusi pemotongan pepohonan masih memiliki beberapa kekurangan dan tantangan. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam penerapan SOP tersebut.

**Kata Kunci:** Standar Operasional Prosedur, Izin, Retribusi, Pemotongan Pepohonan, Kabupaten Lumajang

### PENDAHULUAN

Kabupaten Lumajang, sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, memiliki kekayaan alam yang melimpah, termasuk hutan dan pepohonan. Keberadaan hutan dan pepohonan di wilayah ini memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, menyediakan habitat bagi berbagai spesies, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan akan lahan untuk pembangunan telah menyebabkan terjadinya pemotongan pepohonan yang tidak terkontrol dan tidak berkelanjutan di Kabupaten Lumajang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Markum, Sitti Latifah, and Budhy Setiawan, "Analisis Kebijakan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (Khdtk) Di Senaru Kabupaten Lombok Utara," *Jurnal Sangkareang Mataram* 3, no. 4 (December 29, 2017): 56–62.

Fenomena pemotongan pepohonan yang tidak terkendali ini menimbulkan sejumlah masalah serius. Pertama-tama, pemotongan pepohonan yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Hutan dan pepohonan berperan penting dalam menjaga kualitas udara, menyerap karbon dioksida, serta mengatur pola hujan. Ketika pepohonan dipotong secara besar-besaran, tidak hanya berdampak pada ekosistem lokal, tetapi juga dapat mengakibatkan perubahan iklim secara global. Selain itu, degradasi habitat akibat pemotongan pepohonan dapat mengancam keberlangsungan hidup berbagai spesies fauna yang bergantung pada lingkungan tersebut.

Selain masalah lingkungan, pemotongan pepohonan yang tidak terkendali juga meningkatkan risiko bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor. Pepohonan berfungsi sebagai penahan tanah dan air, sehingga membantu mencegah erosi tanah dan banjir. Ketika pepohonan dipangkas atau ditebang, lapisan tanah yang longgar menjadi rentan terhadap erosi, yang dapat mengakibatkan banjir dan tanah longsor, terutama di daerah lereng.

Pemotongan pepohonan yang terencana dan teratur bisa menjadi sumber daya yang berkelanjutan dan dapat mendukung pembangunan ekonomi lokal. Untuk mencapai hal ini, pemberian izin dan pengenaan retribusi pemotongan pepohonan perlu diatur dengan baik. Proses ini memerlukan suatu pedoman atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan efektif. SOP adalah instrumen yang memastikan bahwa setiap tahapan dari pemberian izin hingga pengenaan retribusi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan.<sup>2</sup>

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pembangunan infrastruktur, permintaan akan lahan dan sumber daya alam semakin meningkat. Pemotongan pepohonan seringkali terjadi untuk memberikan ruang bagi proyek-proyek pembangunan atau kegiatan pertanian. Meskipun pembangunan ini penting untuk perkembangan daerah, namun harus diimbangi dengan keberlanjutan lingkungan.

Pengaruh pemotongan pepohonan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan degradasi tanah, erosi, dan bahkan berpotensi memicu bencana alam seperti tanah longsor. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang ketat untuk mengawasi dan mengontrol setiap aktivitas pemotongan pepohonan. Melihat dampak negatif yang ditimbulkan oleh pemotongan pepohonan yang tidak terkendali, penting untuk mengatur dan mengawasi aktivitas ini secara ketat. Salah satu cara untuk melakukannya adalah melalui pemberian izin dan pengenaan

---

<sup>2</sup> Addini Yusmar, Yani Nurhadryani, and Irman Hermadi, "Analisis Perbaikan dan Pemodelan Proses Bisnis Menggunakan Business Process Improvement Pada Sistem Manajemen Budidaya Buah Agrowing," *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer* 10, no. 5 (October 17, 2023): 1129–38, <https://doi.org/10.25126/jtiik.20231057237>.

retribusi bagi setiap pemotongan pepohonan yang dilakukan di Kabupaten Lumajang. Izin tersebut harus diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sedangkan retribusi harus dikenakan sebagai bentuk kompensasi atas penggunaan sumber daya alam tersebut.<sup>3</sup>

Namun, dalam pelaksanaannya, proses pemberian izin dan pengenaan retribusi pemotongan pepohonan di Kabupaten Lumajang seringkali tidak berjalan dengan baik. Kurangnya pengawasan, lemahnya penegakan hukum, serta minimnya kesadaran akan pentingnya konservasi lingkungan menjadi beberapa faktor penyebabnya. Oleh karena itu, diperlukan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan efektif dalam mengatur dan mengawasi aktivitas pemotongan pepohonan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi penerapan SOP dalam pelaksanaan izin dan retribusi pemotongan pepohonan di Kabupaten Lumajang. Dengan memahami sejauh mana SOP yang telah ada diterapkan secara efektif, diharapkan dapat diidentifikasi kekurangan dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, langkah-langkah perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas pengaturan dan pengawasan aktivitas pemotongan pepohonan di Kabupaten Lumajang.

Manfaat dari penelitian ini sangatlah signifikan. Pertama-tama, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses pemberian izin dan pengenaan retribusi pemotongan pepohonan di Kabupaten Lumajang. Dengan demikian, para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan terkait akan dapat mengetahui kelemahan dan kekurangan yang ada dalam sistem yang telah berjalan. Selanjutnya, penelitian ini juga akan memberikan masukan yang berharga untuk perbaikan dan pengembangan SOP yang lebih baik dalam mengatur pemotongan pepohonan. Dengan memperbaiki SOP yang ada, diharapkan proses pemberian izin dan pengenaan retribusi pemotongan pepohonan dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan transparan. Terakhir, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat serta pihak terkait terhadap regulasi yang berlaku dalam pengelolaan pepohonan di Kabupaten Lumajang.

Namun, perlu diingat bahwa penelitian ini memiliki beberapa batasan. Pertama-tama, fokus penelitian ini terbatas pada penerapan SOP dalam pelaksanaan izin dan retribusi pemotongan pepohonan di Kabupaten Lumajang, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat langsung diterapkan pada konteks lain. Selain itu, wilayah kajian dalam penelitian ini juga

---

<sup>3</sup> Rafi Adinandra and Totok Pujiyanto, "Analisis Sistem Produksi Kopi Menggunakan Good Agriculture Practices," *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis* 4, no. 2 (April 7, 2020): 288–97, <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2020.004.02.7>.

terbatas pada Kabupaten Lumajang, sehingga generalisasi hasil penelitian ini mungkin perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Terakhir, penelitian ini juga tidak mencakup aspek teknis terkait proses pemotongan pepohonan, seperti metode pemotongan yang digunakan atau dampak langsung terhadap ekosistem setempat.

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan fokus pada Kabupaten Lumajang. Pendekatan kualitatif akan digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk pihak berwenang, petani, dan masyarakat lokal yang terkena dampak langsung dari pemotongan pepohonan.

Selain itu, analisis dokumen akan dilakukan untuk memahami secara rinci SOP yang ada, serta peraturan dan regulasi terkait pemotongan pepohonan di wilayah ini. Data yang diperoleh dari kedua sumber ini akan digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana SOP diimplementasikan dan sejauh mana efektivitasnya dalam mengelola pemotongan pepohonan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Konsep Standar Operasional Prosedur**

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah suatu panduan atau aturan yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam suatu proses dijalankan dengan konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks pemotongan pepohonan, SOP dapat mencakup prosedur-prosedur untuk pengajuan izin, penilaian dampak lingkungan, proses retribusi, hingga pemantauan pasca-pemotongan.

### **2. Peran Izin dan Retribusi dalam Pemotongan Pepohonan**

Pemberian izin adalah langkah pertama dalam mengatur pemotongan pepohonan. Izin ini dapat mencakup persyaratan teknis, administratif, dan lingkungan yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengajukan izin. Dengan memiliki izin yang sah, pemotongan pepohonan dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Retribusi, di sisi lain, merupakan kontribusi finansial yang dikenakan pada pihak yang melakukan pemotongan pepohonan. Retribusi ini dapat digunakan untuk mendukung kegiatan konservasi dan pemeliharaan hutan, serta sebagai kompensasi atas dampak lingkungan dari pemotongan tersebut.

### 3. Studi Terdahulu tentang Penerapan SOP di Berbagai Konteks

Sejumlah studi sebelumnya telah dilakukan untuk mengevaluasi penerapan SOP dalam berbagai konteks, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Temuan-temuan dari studi-studi tersebut dapat memberikan wawasan yang berharga tentang faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas SOP, serta strategi untuk meningkatkan implementasinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai bagian terpenting dari penelitian ini, pembahasan menggali lebih dalam tentang temuan yang dihasilkan dari analisis data. Melalui pembahasan ini, kita dapat memahami secara lebih jelas tantangan yang dihadapi, dampak dari penerapan SOP, dan perbandingan dengan standar nasional atau internasional. Penjelasan mendalam akan memberikan wawasan yang lebih kaya dan mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang konteks dan implikasi dari penelitian ini.

Sebelum memasuki setiap sub bab, kita akan memberikan penjelasan singkat mengenai fokus pembahasan dalam sub bab tersebut, serta menggarisbawahi pentingnya pemahaman akan hal tersebut dalam konteks penerapan SOP dalam pelaksanaan izin dan retribusi pemotongan pepohonan di Kabupaten Lumajang. Penjelasan ini akan membantu pembaca memahami tujuan dari setiap sub bab dan bagaimana informasi yang disajikan akan berkontribusi pada pemahaman keseluruhan.

### Tantangan dalam Penerapan SOP

Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan izin dan retribusi pemotongan pepohonan di Kabupaten Lumajang tidak lepas dari berbagai tantangan yang dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dan berkualifikasi. Dalam konteks ini, terdapat kekurangan tenaga ahli yang memahami dengan baik prosedur dan regulasi terkait pemotongan pepohonan. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam pelaksanaan SOP secara konsisten dan efektif.<sup>4</sup>

Tantangan lainnya adalah keterbatasan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan SOP. Kabupaten Lumajang mungkin menghadapi kendala dalam hal teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan untuk memantau dan melacak proses izin serta pembayaran retribusi pemotongan pepohonan. Kurangnya infrastruktur yang memadai dapat menghambat efisiensi dan akurasi dalam proses administratif terkait pemotongan pepohonan.

---

<sup>4</sup> metatags generator, "Identifikasi Penilaian Risiko Kecelakaan Kerja Dengan Metode Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control (HIRARC) | Jurnal INTECH Teknik Industri Universitas Serang Raya," April 26, 2023, <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/INTECH/article/view/871>.

Perubahan kebijakan yang tidak konsisten juga merupakan tantangan dalam penerapan SOP. Kebijakan terkait pengelolaan hutan dan lingkungan dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu, baik dalam tingkat lokal maupun nasional. Hal ini dapat membingungkan para pemangku kepentingan dan mengganggu kesinambungan dalam penerapan SOP. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan konsistensi dalam penerapan SOP.<sup>5</sup>

Selain itu, resistensi dari pihak-pihak terkait juga menjadi tantangan serius. Beberapa pihak mungkin tidak sepenuhnya mendukung penerapan SOP karena alasan ekonomi, politik, atau sosial. Mereka mungkin menghindari atau bahkan menentang SOP yang mengatur izin dan retribusi pemotongan pepohonan karena dampaknya terhadap kepentingan mereka. Resistensi semacam ini dapat menghambat implementasi SOP secara efektif dan menyebabkan ketidakpatuhan.

Dalam mengatasi tantangan-tantangan ini, langkah-langkah strategis perlu diambil. Pertama-tama, penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan SOP. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta perekrutan tenaga ahli yang memadai. Investasi dalam infrastruktur juga diperlukan untuk memastikan bahwa proses administratif terkait pemotongan pepohonan dapat berjalan dengan lancar dan efisien.

Selanjutnya, perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara semua pemangku kepentingan terkait pengelolaan hutan dan lingkungan. Ini mencakup koordinasi antara lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta yang terlibat dalam pemotongan pepohonan. Dengan adanya koordinasi yang baik, perubahan kebijakan yang konsisten dapat dicapai, dan implementasi SOP dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Selain itu, untuk mengatasi resistensi dari pihak-pihak terkait, penting untuk melakukan advokasi yang efektif dan membangun kesadaran tentang pentingnya penerapan SOP dalam pengelolaan pemotongan pepohonan. Ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, dialog, dan partisipasi publik yang inklusif. Dengan melibatkan semua pihak terkait dan memperhitungkan kepentingan mereka, dapat dicapai dukungan yang lebih besar untuk penerapan SOP.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut secara efektif, diharapkan penerapan SOP dalam pelaksanaan izin dan retribusi pemotongan pepohonan di Kabupaten Lumajang dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan. Ini akan memberikan manfaat yang

---

<sup>5</sup> Sarmidi Sarmidi, Yulius Mases, and Rifky Aryadho Prananda, "Identifikasi Risiko Pengoperasian Bulldozer Di Area Live Stockpile OPB 4 PT. Bukit Asam, Tbk.," *Jurnal Ilmiah Teknik Dan Sains* 1, no. 2 (December 29, 2023): 61–68, <https://doi.org/10.62278/jits.v1i2.12>.

signifikan bagi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lumajang.<sup>6</sup>

### **Dampak Penerapan SOP terhadap Pengelolaan Pemotongan Pepohonan**

Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan pemotongan pepohonan di Kabupaten Lumajang memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek, mulai dari proses perizinan hingga pengawasan terhadap kegiatan pemotongan pepohonan itu sendiri. Dalam bagian ini, akan diuraikan secara rinci mengenai dampak positif yang telah terjadi serta beberapa tantangan yang masih perlu diatasi.<sup>7</sup>

#### **a. Peningkatan Efisiensi Proses Perizinan**

Penerapan SOP dalam proses perizinan pemotongan pepohonan membawa dampak positif terhadap efisiensi. Dengan SOP yang jelas dan terstandarisasi, waktu yang diperlukan untuk memproses izin menjadi lebih singkat karena proses menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh semua pihak terkait. Misalnya, adanya prosedur yang jelas untuk pengumpulan dokumen, evaluasi permohonan, dan pemberian izin memastikan bahwa tidak ada kebingungan atau keambiguitasan yang dapat memperlambat proses. Hal ini membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meminimalkan risiko terjadinya penundaan dalam pengelolaan kegiatan pemotongan pepohonan.<sup>8</sup>

#### **b. Peningkatan Kepatuhan Terhadap Regulasi**

SOP juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi terkait pemotongan pepohonan. Dengan prosedur yang jelas dan terstandarisasi, para pemohon izin serta pelaksana kegiatan pemotongan pepohonan menjadi lebih aware terhadap kewajiban mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalnya, dengan adanya SOP yang mengatur tentang tata cara pemilihan pohon yang boleh dipotong, penggunaan alat yang tepat, dan pelaporan hasil pemotongan, para pelaku usaha akan lebih memperhatikan aspek legalitas dan lingkungan dalam setiap aktivitas mereka. Ini membantu dalam mengurangi risiko terjadinya

---

<sup>6</sup> Rina Sulistya Puspasari, Hartuti Purnaweni, and Aloysius Rengga, "Implementasi Penataan Ruang Terbuka Hijau Pada Taman Di Kota Magelang Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau," *Journal of Public Policy and Management Review* 4, no. 4 (October 5, 2015): 136–48, <https://doi.org/10.14710/jppmr.v4i4.9365>.

<sup>7</sup> Aben Bintang Manondang Situmorang et al., "Kekuatan Eksekutorial Jaksa Dalam Pelaksanaan Pidana Tambahan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1203K/PID.SUS.LH/2016 Tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup," *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 2 (August 30, 2022): 236–58, <https://doi.org/10.32734/mah.v1i2.8713>.

<sup>8</sup> Made Wirawanto, Ni Nyoman Mariadi, and Saptala Mandala, "Pelaksanaan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng)," *Kertha Widya* 9, no. 2 (January 13, 2022): 111–33, <https://doi.org/10.37637/kw.v9i2.890>.

pelanggaran atau penyalahgunaan izin yang dapat berdampak negatif pada lingkungan dan masyarakat sekitar.<sup>9</sup>

c. Pengurangan Risiko Kerugian Lingkungan

Penerapan SOP juga membawa dampak positif dalam pengurangan risiko kerugian lingkungan akibat dari kegiatan pemotongan pepohonan. Melalui prosedur yang telah ditetapkan, setiap kegiatan pemotongan pepohonan harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan seperti pemilihan pohon yang akan dipotong, metode pemotongan yang aman, serta pengelolaan limbah pepohonan. Dengan demikian, potensi kerusakan lingkungan dapat diminimalkan dan keberlanjutan ekosistem hutan di Kabupaten Lumajang dapat terjaga.<sup>10</sup>

d. Peningkatan Pendapatan Daerah

Selain itu, penerapan SOP juga memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah melalui retribusi yang lebih terstruktur dan terukur. Dengan adanya prosedur yang jelas mengenai besaran retribusi yang harus dibayarkan oleh para pemohon izin, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi pendapatan dari kegiatan pemotongan pepohonan. Pendapatan yang diperoleh kemudian dapat dialokasikan untuk pengembangan lebih lanjut dalam pengelolaan hutan dan lingkungan di Kabupaten Lumajang.<sup>11</sup>

Dengan demikian, penerapan SOP dalam pengelolaan pemotongan pepohonan di Kabupaten Lumajang memberikan dampak positif yang signifikan dalam berbagai aspek, mulai dari efisiensi proses perizinan hingga pengelolaan lingkungan dan peningkatan pendapatan daerah. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, namun dengan upaya yang terus menerus, diharapkan penerapan SOP ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan di Kabupaten Lumajang.

### **Perbandingan dengan Standar Nasional atau Internasional**

Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan izin dan retribusi pemotongan pepohonan di Kabupaten Lumajang menjadi penting untuk dievaluasi sehubungan dengan standar nasional atau internasional yang ada. Standar ini merupakan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga internasional untuk menjaga konsistensi,

---

<sup>9</sup> Lalu Abdul Azus and Destha Titi Raharjana, "Tantangan Pendampingan Kepariwisata Di Masyarakat Baduy," *Jurnal Abdimas Pariwisata* 5, no. 1 (January 16, 2024): 87–102, <https://doi.org/10.36276/jap.v5i1.616>.

<sup>10</sup> Tajuddin Tajuddin and Chafid Khairul Anam, "Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Kapitalis Dan Hukum Islam (Studi Komparasi Integrasi Keilmuan)," *Jurnal Pilar Keadilan* 1, no. 1 (July 7, 2021): 51–67, <https://doi.org/10.59635/jpk.v1i1.151>.

<sup>11</sup> Billy Andrian and Jhon Viter Marpaung, "Perancangan Transportasi Agrikultur Pasca Panen Buah Kakao," *JCA of Design & Creative* 1, no. 01 (2021), <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/JCADESIGN/article/view/203>.



keamanan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk pemotongan pepohonan.<sup>12</sup>

a. Standar Nasional tentang Pengelolaan Pemotongan Pepohonan

Di tingkat nasional, Indonesia memiliki sejumlah peraturan dan standar yang mengatur pengelolaan sumber daya alam, termasuk pemotongan pepohonan. Salah satu dokumen penting dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mengatur tentang izin-izin dan retribusi terkait dengan kegiatan kehutanan, termasuk pemotongan pepohonan. Pada tingkat yang lebih rinci, terdapat peraturan pemerintah dan keputusan menteri yang mengatur prosedur izin, retribusi, dan pengelolaan sumber daya alam.<sup>13</sup>

Salah satu standar operasional yang penting adalah Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang merupakan persyaratan utama untuk ekspor produk kayu dari Indonesia. SVLK menetapkan prosedur dan kriteria untuk memastikan bahwa kayu yang ditebang telah dikelola secara legal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan SOP di Kabupaten Lumajang harus sejalan dengan persyaratan SVLK untuk memastikan kepatuhan dan kredibilitas ekspor produk kayu.<sup>14</sup>

Berikut adalah salah satu data untuk menunjukkan hasil Rekapitulasi Permohonan Potong Pohon dan Pemangkasan Pohon Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan (HARLING) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Tahun 2021-2023:

---

<sup>12</sup> Veggy Shintya Putri, Ibrahim Ibrahim, and Luna Febriani, "Peluang Dan Tantangan Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya Bukit Mangkol," *Jurnal Sosial Dan Sains* 1, no. 6 (June 15, 2021): 491–98, <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i6.117>.

<sup>13</sup> Amin Kiswanto, "Pentahelix Program Pendampingan Model Pentahelix Dan Pemberian Bantuan Alat Pelindung Diri Di Kebon Empring Dalam Menghadapi Masa Pandemi (New Normal)," *Jurnal Abdimas Pariwisata* 2, no. 2 (October 23, 2021): 75–83, <https://doi.org/10.36276/jap.v2i2.84>.

<sup>14</sup> Husna Karimah et al., "Peluang Dan Tantangan Pengelolaan Kegiatan Ekonomi Sirkular Di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cahaya Kencana Martapura," *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan* 12, no. 1 (October 21, 2023): 1–20, <https://doi.org/10.22437/jesl.v12i1.20967>.

**Penerapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Izin Dan Retribusi Pemotongan Pohon Di Kabupaten Lumajang**

REKAPITULASI PERMOROHAN POTONG POHON DAN PEMANGKASAN POHON BIDANG PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN (HARLING) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021-TAHUN 2023

REKAPITULASI PERMOROHAN POTONG POHON TAHUN 2023							
No.	Tanggal Surat Masuk	Nama Pemohon/Instansi	Alamat Pemohon	Lokasi Pemangkasan Surat Pemotongan/Pangkasaran	Hasil Survei	Tindak Lanjut	No. HP
1	2 Februari 2023	Mohamad Daris Retribusi 1.000.000	Dusun Watan Segoran RT015/RW006 Kelurahan Jogotuman Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang	Jl. Aho-aho Timur 3 RT002/RW006 Kelurahan Jogotuman Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang	Pohon perlu dilakukan pemotongan, dikarenakan posisi pohon mengganggu rencana pelaksanaan masuk ke lantai	Pemotongan Pohon	08222969224
2	22 Februari 2023	Mutiara Mardani Retribusi 1.500.000	Dusun Curahgeno RT021/RW006 Desa Ganti Kecamatan Samberejo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang	Jl. Jendral A. Yani No. 115 Kelurahan Kephago Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang	Pohon Perlu dilakukan pemotongan guna membuka lahan parkir di depan klinik kesehatan NU Lumajang dikarenakan posisi pohon terjajar tersebut mengganggu akses lahan parkir Klinik Kesehatan NU Lumajang dan peneroban diharapkan pemasangan pohon pengganti	Pemotongan Pohon	082228333336
3	22 Februari 2023	dr. Gustie Foghasto, MD, KES Retribusi 4.000.000	Perumahan RSUD dr. Haryoto RT003/RW017 Kelurahan Tompolowan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang	Jl. Brigadir Solo Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang	Lokasi yang akan diajukan pemotongan tersebut akan dilakukan pembongkaran Kantor mala dari itu itu 5 pohon utama yang berdiameter 31 cm lokasi tersebut perlu dilakukan pemotongan dikarenakan letak pohon tersebut mengganggu akses lahan parkir ke lantai yang akan dibangun dan peneroban diharapkan pemasangan pohon pengganti	Pemotongan Pohon	082335073988
4	28 Februari 2023	Sri Sarnini Retribusi 1.500.000	Jl. Veteran 16 RT002/RW001 Kelurahan Kephago Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang	Jl. Veteran 16 RT002/RW001 Kelurahan Kephago Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang	pohon perlu dilakukan pemotongan dikarenakan akan dibangunnya akses lahan parkir mobil ke dalam rumah pemohon dari peneroban diharapkan pemasangan pohon pengganti	Pemotongan Pohon	089849674185
5	15 Maret 2023	Rofia Annis Retribusi 1.500.000	Perumahan Blok Permai Blok F-27 RT024/RW005 Desa Seledabek Kecamatan Sidalono Kabupaten Lumajang	Jl. PD Sidiyemi No. 119 Kelurahan Tompolowan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang	Dari 2 pohon yang diajukan untuk dipotong hanya 1 pohon yang dapat dilakukan pemotongan, yaitu pohon kina yang dikarenakan posisi pohon tersebut menghalangi akses jalan yang menyebabkan terganggunya rencana pembangunan mobil, sedangkan pohon glodok hanya perlu dilakukan pengalasan, peneroban diharapkan melakukan pemangkasan pohon pengganti di sekitar lokasi pemotongan pohon	Pemotongan Pohon	085257792232
6	4 Mei 2023	Mohamad Hijran Retribusi 1.500.000	Dusun Kojan RT008/RW002 Desa Petahun Kecamatan Samberejo Kabupaten Lumajang	Jl. Hayan Waruk Kelurahan Kephago Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang	Pemohon diharap menyesuaikan gambar dan DMS bangunan sebagai bahan pertimbangan pemotongan pohon	Pemotongan Pohon	082335073986
7	7 Juni 2023	Yuli Octaviani Retribusi 1.500.000	Jl. Iman Supri GG III 12 B RT001/RW004 Kelurahan Jogotuman Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang	Jl. Iman Supri GG III 12 B RT001/RW004 Kelurahan Jogotuman Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang	Dari 3 pohon yang diajukan pemotongan hanya 1 pohon yang dapat dilakukan pemotongan dikarenakan lokasi pohon masih terlalu banyak bangunan	Pemotongan Pohon	081336766676
8	9 Juni 2023	Ami Masnah Retribusi 1.500.000	Perumahan Pondok Abadi Blok A3 Patan RT007/RW006 Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang	Perumahan Pondok Abadi Blok A3 Patan RT007/RW006 Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang	Pohon perlu dilakukan pemotongan dikarenakan posisi pohon mengganggu proses pembangunan	Pemotongan Pohon	082345440882
9	1 Desember 2023	Infis Tambil (Ganti bibit)	Jl. Kyai Muchlis No. 24 RT001/RW001 Kelurahan Citrodwargan Kec. Lumajang	Jl. Kyai Muchlis No. 24 RT001/RW001 Kelurahan Citrodwargan Kec. Lumajang	maka dengan ini bahwasanya pohon yang besarnya pohon anggur yang berdiameter 50 cm lokasi dapat dilakukan penebangan	Penebangan Pohon	08123909600
10	1 Desember 2023	Mahdi Syahoni (Ganti Bibit)	Perumahan Kaderangan Aisi 31-A RT005/RW004 Desa Pajang Kec. Kaderan Probolinggo	Jl. Kapas Perumahan Pondok Abadi	halwa dari 6 pohon sejenis pohon mahoni berdiameter 30 cm lokasi dapat dilakukan penebangan	Penebangan Pohon	082350443065
11	11 Desember 2023	Budi Wahyu (Ganti Bibit)	Dusun Perjarangan RT014/RW003 Desa Petahun Kec. Samberejo Kab. Lumajang	Jl. Seneca utara SPBU Desa Petahun (sebet) Kec. Samberejo Kab. Lumajang	Berdasarkan hasil survei lapangan ada 5 (lima) pohon yang diajukan penebangan, hanya 2 (dua) pohon yang dapat dilakukan penebangan, yaitu pohon yang berdiameter 2 (dua) dan 4 (empat) sesuai foto survei dikarenakan kedua pohon tersebut mengganggu akses masuk mobil ketika masuk ke area toilet	Penebangan Pohon	081234982222

**Gambar 1.** Rekapitulasi Permohonan Potong Pohon dan Pemangkasan Pohon Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan (HARLING) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Tahun 2023.

**b. Standar Internasional dalam Pengelolaan Kehutanan**

Di tingkat internasional, berbagai lembaga seperti Forest Stewardship Council (FSC) dan Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) telah menetapkan standar untuk sertifikasi keberlanjutan dalam pengelolaan hutan dan pepohonan. Standar ini meliputi

aspek-aspek seperti konservasi biodiversitas, hak masyarakat adat, dan pemeliharaan habitat satwa liar.<sup>15</sup>

Kabupaten Lumajang dapat membandingkan penerapan SOP-nya dengan standar internasional ini untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pemotongan pepohonan di daerah tersebut memenuhi kriteria keberlanjutan yang diakui secara global. Hal ini penting untuk memastikan bahwa praktik pemotongan pepohonan tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi tetapi juga aspek lingkungan dan sosial yang berkelanjutan.

### c. Analisis Perbandingan dan Implikasinya

Dalam menganalisis perbandingan antara penerapan SOP di Kabupaten Lumajang dengan standar nasional dan internasional, perlu dilakukan penelitian mendalam terhadap kesesuaian, kepatuhan, dan potensi perbaikan yang diperlukan. Temuan ini akan memberikan wawasan tentang sejauh mana Kabupaten Lumajang telah mencapai standar yang ditetapkan dan potensi untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan pemotongan pepohonan.<sup>16</sup>

Implikasi dari analisis ini adalah pentingnya memperkuat sistem regulasi dan penerapan SOP yang sesuai dengan standar nasional dan internasional untuk memastikan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam konteks pemotongan pepohonan. Dengan demikian, Kabupaten Lumajang dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat lokal maupun pasar global atas keberlanjutan praktik kehutanan di daerah tersebut.<sup>17</sup>

## KESIMPULAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana SOP diterapkan dalam pelaksanaan izin dan retribusi pemotongan pepohonan di Kabupaten Lumajang. Dengan menganalisis efektivitas dan tantangan yang dihadapi, dapat diidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan pepohonan yang lebih berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap literatur tentang penerapan SOP dalam konteks pengelolaan sumber daya alam.

---

<sup>15</sup> Samsud Dlukha et al., "Pemeliharaan Hazard Di Padang Golf Matoa Nasional, Jakarta Selatan," *Buana Sains* 17, no. 2 (January 4, 2018): 115–24, <https://doi.org/10.33366/bs.v17i2.810>.

<sup>16</sup> Rina Fitriana, Wawan Kurniawan, and Jaquiline Glenadys Siregar, "Pengendalian Kualitas Pangan Dengan Penerapan Good Manufacturing Practices (Gmp) Pada Proses Produksi Dodol Betawi (Studi Kasus Ukm Mc)," *Jurnal Teknologi Industri Pertanian* 30, no. 1 (April 15, 2020), <https://doi.org/10.24961/j.tek.ind.pert.2020.30.1.110>.

<sup>17</sup> Hesty Aisyah, "Pengembangan Industri Pengolahan Karet Berbasis UIKM Di Kabupaten Dharmasraya," *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI Dan MANAJEMEN BISNIS* 8, no. 1 (July 30, 2020): 74–81, <https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i1.1601>.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adinandra, Rafi, and Totok Pujiyanto. "Analisis Sistem Produksi Kopi Menggunakan Good Agriculture Practices." *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis* 4, no. 2 (April 7, 2020): 288–97. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2020.004.02.7>.
- Aisyah, Hesty. "Pengembangan Industri Pengolahan Karet Berbasis UIKM Di Kabupaten Dharmasraya." *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI Dan MANAJEMEN BISNIS* 8, no. 1 (July 30, 2020): 74–81. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i1.1601>.
- Andrian, Billy, and Jhon Viter Marpaung. "Perancangan Transportasi Agrikultur Pasca Panen Buah Kakao." *JCA of Design & Creative* 1, no. 01 (2021). <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/JCADESIGN/article/view/203>.
- Azus, Lalu Abdul, and Destha Titi Raharjana. "Tantangan Pendampingan Kepariwisata Di Masyarakat Baduy." *Jurnal Abdimas Pariwisata* 5, no. 1 (January 16, 2024): 87–102. <https://doi.org/10.36276/jap.v5i1.616>.
- Dlukha, Samsud, Sitti Wardiningsih, Yusi Febriani, Ray March Syahadat, and Priambudi Trie Putra. "Pemeliharaan Hazard Di Padang Golf Matoa Nasional, Jakarta Selatan." *BUANA SAINS* 17, no. 2 (January 4, 2018): 115–24. <https://doi.org/10.33366/bs.v17i2.810>.
- Fitriana, Rina, Wawan Kurniawan, and Jaquiline Glenadys Siregar. "Pengendalian Kualitas Pangan Dengan Penerapan Good Manufacturing Practices (Gmp) Pada Proses Produksi Dodol Betawi (Studi Kasus Ukm Mc)." *Jurnal Teknologi Industri Pertanian* 30, no. 1 (April 15, 2020). <https://doi.org/10.24961/j.tek.ind.pert.2020.30.1.110>.
- generator, metatags. "Identifikasi Penilaian Risiko Kecelakaan Kerja Dengan Metode Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control (HIRARC) | Jurnal INTECH Teknik Industri Universitas Serang Raya," April 26, 2023. <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/INTECH/article/view/871>.
- Karimah, Husna, Lola Malihah, Melyda Rahmah, and Lailan Nawiyah. "Peluang Dan Tantangan Pengelolaan Kegiatan Ekonomi Sirkular Di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cahaya Kencana Martapura." *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan* 12, no. 1 (October 21, 2023): 1–20. <https://doi.org/10.22437/jesl.v12i1.20967>.
- Kiswanto, Amin. "Pentahelix Program Pendampingan Model Pentahelix Dan Pemberian Bantuan Alat Pelindung Diri Di Kebon Empring Dalam Menghadapi Masa Pandemi (New Normal)." *Jurnal Abdimas Pariwisata* 2, no. 2 (October 23, 2021): 75–83. <https://doi.org/10.36276/jap.v2i2.84>.
- Markum, Sitti Latifah, and Budhy Setiawan. "Analisis Kebijakan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (Khdtk) Di Senaru Kabupaten Lombok Utara." *Jurnal Sangkareang Mataram* 3, no. 4 (December 29, 2017): 56–62.
- Puspasari, Rina Sulistya, Hartuti Purnaweni, and Aloysius Rengga. "Implementasi Penataan Ruang Terbuka Hijau Pada Taman Di Kota Magelang Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau." *Journal of Public Policy and Management Review* 4, no. 4 (October 5, 2015): 136–48. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v4i4.9365>.

- Putri, Veggy Shintya, Ibrahim Ibrahim, and Luna Febriani. "Peluang Dan Tantangan Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya Bukit Mangkol." *Jurnal Sosial Dan Sains* 1, no. 6 (June 15, 2021): 491–98. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i6.117>.
- Sarmidi, Sarmidi, Yulius Mases, and Rifky Aryadho Prananda. "Identifikasi Risiko Pengoperasian Bulldozer Di Area Live Stockpile OPB 4 PT. Bukit Asam, Tbk." *Jurnal Ilmiah Teknik Dan Sains* 1, no. 2 (December 29, 2023): 61–68. <https://doi.org/10.62278/jits.v1i2.12>.
- Situmorang, Aben Bintang Manondang, Alvi Syahrin, Sunarmi Sunarmi, and M. Ekaputra. "Kekuatan Eksekutorial Jaksa Dalam Pelaksanaan Pidana Tambahan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1203K/PID.SUS.LH/2016 Tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 2 (August 30, 2022): 236–58. <https://doi.org/10.32734/mah.v1i2.8713>.
- Tajuddin, Tajuddin, and Chafid Khairul Anam. "Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Kapitalis Dan Hukum Islam (Studi Komparasi Integrasi Keilmuan)." *Jurnal Pilar Keadilan* 1, no. 1 (July 7, 2021): 51–67. <https://doi.org/10.59635/jpk.v1i1.151>.
- Wirawanto, Made, Ni Nyoman Mariadi, and Saptala Mandala. "Pelaksanaan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng)." *Kertha Widya* 9, no. 2 (January 13, 2022): 111–33. <https://doi.org/10.37637/kw.v9i2.890>.
- Yusmar, Addini, Yani Nurhadryani, and Irman Hermadi. "Analisis Perbaikan dan Pemodelan Proses Bisnis Menggunakan Business Process Improvement Pada Sistem Manajemen Budidaya Buah Agrowing." *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer* 10, no. 5 (October 17, 2023): 1129–38. <https://doi.org/10.25126/jtiik.20231057237>.